

**Judul** : Aminurrakhman, Anggota Komisi II DPR : DPT Harus Memiliki Validitas & Akurat  
**Tanggal** : Rabu, 05 Juli 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## AMINURROKHMAN, Anggota Komisi II DPR

# DPT Harus Memiliki Validitas & Akurat

“

KPU harus memastikan data itu sudah valid semua. Komisi II DPR tidak mau DPT menjadi pemicu sengketa Pemilu. Makanya, KPU harus memperbaikinya jika ada kesalahan.



**Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil menemukan 52 juta data invalid dalam DPS. Tapi, KPU hanya mencoret satu juta. Bagaimana respons Anda?**

Temuan masyarakat itu perlu kita verifikasi untuk memastikan, apakah itu betul-betul akurat atau tidak. Ketika data itu akurat, tentu KPU harus melakukan penyesuaian.

**Mengapa KPU perlu melakukan penyesuaian?**

Karena, penetapan DPT yang telah diplenokan dan diumumkan ke publik, harus betul-betul memiliki validasi data yang sudah akurat. Sehingga, ke depan tidak ada lagi sengketa Pemilu karena masalah DPT.

**Setiap Pemilu, DPT selalu bermasalah ya?**

Itu masalah klasik, makanya perlu kita

cermati. Biasanya, sengketa Pemilu itu dipicu DPT, dan itu terjadi setelah pelaksanaan Pemilu. Ketika ada yang gagal dan kalah, lalu menggunakan data DPT bermasalah untuk menggugat ke MK.

Karenanya, saya meminta kepada KPU untuk memastikan DPT hasil pleno yang sudah diumumkan ke publik, memiliki dasar data yang akurat, *fixed* dan sudah sesuai. Jika ada data pihak lain berseberangan dengan DPT KPU, kita sandingkan untuk mencari kebenarannya.

**DPT sudah disahkan KPU, dan akan diberikan ke parpol. Tetapi, ketika ditemukan data invalid, apakah bisa diperbaiki?**

KPU harus memastikan data itu sudah valid semua. Komisi II tidak mau DPT menjadi pemicu sengketa Pemilu. Makanya, KPU harus memperbaikinya jika ada kesalahan.

Sebab, setiap Pemilu, muncul masalah

DPT. Kita tidak ingin itu terjadi lagi Pemilu 2024 harus dikerjakan secara profesional, independen, mengedepankan demokrasi yang berkualitas. Nah untuk mewujudkan itu semua, harus dengan kinerja yang optimal dari semua penyelenggara Pemilu.

**Kembali mengenai data 52 juta pemilih diduga invalid di DPS. Tapi, yang dicoret cuma satu juta. Apakah itu berarti ada 51 juta lagi yang bermasalah?**

Kita minta ada evaluasilah. Karen selisih sekian juta itu cukup besar. Jangan sampai nanti ada yang kalah dalam Pemilu lalu menjadikan data ini sebagai argumen untuk melaporkan sengketa Pemilu.

**Apa saran Anda untuk KPU?**

Saya minta KPU untuk bekerja maksimal. Jika ada masalah mengenai DPT ini, tinggal disandingkan untuk mencari kebenarannya. ■ REI